



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI, DIRUT PT GARAM (PERSERO),
DIRUT PT PERIKANAN INDONESIA (PERSERO), DAN DIRUT PT RAJAWALI
NUSANTARA INDONESIA/HOLDING PANGAN ID FOOD**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 14
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 6 September 2023
Waktu : Pukul 10.20 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI
Gedung Nusantara I (KK-IV)
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDI P)
Acara : 1. 1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN
TA 2022 (hasil pembahasan disampaikan
secara tertulis kepada Badan Anggaran);
2. RKA K/L Tahun 2024 (hasil pembahasan
disampaikan secara tertulis kepada Badan
Anggaran untuk disinkronisasi);
3. Usulan program-program yang akan didanai
oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari
Komisi; serta
4. Isu-isu aktual lainnya.
- Sekretaris Rapat : Ulfa Nurfajar, S.E., M.B.A (Kepala Bagian
Sekretariat Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. Anggota Komisi IV DPR RI
29 dari 54 orang Anggota dengan rincian:
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan

5 dari 11 orang Anggota

- 1) Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
- 2) H. Sunarna, S.E., M. Hum.
- 3) Dr. H. Sutrisno, S.E., M.B.A.
- 4) Maria Lestari, S.Pd.
- 5) M.R. Ihsan Yunus, BA., B.Comm., ME.Con.

2. Fraksi Partai Golongan Karya

5 dari 9 orang Anggota

- 1) Ir. Budhy Setiawan, M. Si.
- 2) H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
- 3) Firman Soebayo, S.E., M.H.
- 4) Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.
- 5) Ravindra Airlangga, M.S.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

5 dari 7 orang Anggota

- 1) G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
- 2) Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
- 3) Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
- 4) Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc.
- 5) Dr. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat

1 dari 6 orang Anggota

- 1) Ir. Abdullah Tuasikal

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

3 dari 5 orang Anggota

- 1) H. Muhtarom, S. Sos.
- 2) Daniel Johan, S.E., M.M.
- 3) Edward Tanur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat

2 dari 5 orang Anggota

- 1) Dr. Suhardi Duka, M.M.
- 2) Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

4 dari 5 orang Anggota

- 1) drh. H. Slamet
- 2) Dr. Hermanto, S.E., M.M.
- 3) H. Johan Rosihan, S.T.

4) Saadiah Uluputty, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional

4 dari 4 orang Anggota

1) Dr. H. Muhammad Syafrudin, S.T.,
M.M.

2) Haerudin, S.Ag., M.H.

3) Ir. Alimin Abdullah

4) Daeng Muhammad, S.E., M.Si.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

0 dari 2 orang Anggota

B. Anggota Izin

Fraksi Partai Demokrat

1) Hj. Nur'aeni, S. Sos., M.Si.

C. Pemerintah:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan (Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M.);

2. Sekretaris Jenderal (Drs. Antam Novambar, S.H., M. Hum.);

3. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya (Dr. TB. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc.);

4. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M. Han.);

5. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Dr. Budi Sulistiyo, M.Si.);

6. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H.);

7. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Dr. I Nyoman Radiarta, S.Pi., M.Sc.);

8. Plt. Inspektur Jenderal (Ir. Teuku Nilwan, M.M.);

9. Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (Dr. Agus Suherman, S.Pi., M.Si.);

10. Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Ir. Ishartini);

11. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID FOOD (Frans Marganda Tambunan);
12. Direktur Utama PT Perikanan Indonesia (Sigit Muhartono); dan
13. Direktur Utama PT Garam (Persero) (Arif Haendra).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E. / F-PDIP):

Saya rasa pembahasan ini kan sudah berkali-kali nih Raker sudah, RDP sudah ya. *Enggak* boleh dong, kita kan harus tetap mengikuti mekanisme. Kebetulan saya juga jam 11.30 saya harus jalan karena mau ke DPP.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV,
Yang terhormat Menteri Kelautan dan Perikanan,
Yang terhormat Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia, holding pangan ID Food,
Yang terhormat Direktur Utama Perikanan Indonesia,
Yang terhormat Direktur PT Garam Indonesia,

Mengawali rapat hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat walafiat, kecuali menterinya *nggak* sehat.

Sesuai dengan jadwal acara rapat Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Bamus tanggal 5 Juli 2023 dan keputusan Rapat Internal tanggal 31 Agustus. Pada hari ini, Rabu, 6 September Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan menghadirkan Direktur Utama seperti yang di atas tadi dalam rangka membahas finalisasi RKAKL karena paling lambat besok malam sudah dimasukkan ke Badan Anggaran. Usulan program yang akan didanai oleh DAK sudah dijelaskan, saya rasa tidak perlu dijelaskan lagi dalam Raker yang lalu sudah, RDP sudah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan tentang Tata Tertib rapat kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Rapat kerja ini kita mulai pada pukul 10.20 menit dan akan diakhiri kalau bisa pukul 12.00 WIB. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) tentang Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan singkat Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV;
4. Jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara dapat disetujui?

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Sebagaimana kita ketahui pelaksanaan tugas Komisi dalam bidang anggaran terkait pembahasan rencana undang-undang tentang APBN beserta nota keuangannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Komisi melakukan Rapat Kerja dengan pemerintah membahas alokasi anggaran untuk program kegiatan kementerian lembaga dan hasil pembahasan akan kami sampaikan secara tertulis ke Badan Anggaran.

Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan rapat kerja hari ini berdasarkan surat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor B/8607/AG.05/07/2023 tanggal 12 Juli 2023 mengenai Penyampaian Rancangan Pembahasan Rencana Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2022 dan Rancangan Pembahasan Rencana Undang-Undang tentang APBN 2024.

Pada rapat kerja yang lalu, kita sudah melakukan penajaman melalui rapat kerja maupun RDP dan telah menyetujui pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 7,04 triliun yang mengacu kepada rancangan rencana kerja program yang telah diusulkan untuk selanjutnya hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Banggar. Menteri, waktu itu ada minta tambahan berapa triliun? yang sudah didaftarkan secara resmi melalui surat? *full?*

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

KETUA RAPAT:

Hah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

141.

KETUA RAPAT:

Jadi ngusulkan, mengusulkannya 900 lebih.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Dapatnya 141.

KETUA RAPAT:

Ya, kalau gitu nanti tolong nanti, masukkan kesimpulan rapat karena ini masalah PSDKP ini banyak masalah karena wilayahnya sangat sedikit sekali ya. Jadi, mungkin nanti setelah ini, Bu, Pak Sekjen, bisa nemui Ketua Banggar karena kemarin juga LHK itu minta tambahan bantuan APBN senilai 3 triliun, tetapi dapatnya cuman 105 ya. Sedangkan PNBP-nya naik targetnya melebihi dari mencapai 119%, itu sudah saya konsultasikan, nanti mungkin pada awal tahun akan ada penambahan anggaran gitu. Saya berharap, supaya pagu anggaran untuk patrolinya akan bertambah.

Komisi IV mengapresiasi langkah awal KKP dalam menindaklanjuti masukan, masukan dan, mengapresiasi langkah awal KKP dalam menindaklanjuti masukan dan saran Komisi IV. Hal ini menjadi penting dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global yang terus tidak menentu dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.

Harapan ini tentunya membutuhkan komitmen bersama antara KKP dengan Komisi IV dalam memperbaiki ekonomi sektor kelautan dan perikanan. Adapun terkait dana alokasi khusus 2024 sebesar 1,3 triliun untuk provinsi dan kabupaten kota. Saya rasa masalah DAK tidak perlu dijelaskan karena kemarin sudah dijelaskan. Dan Komisi IV mendorong menu yang telah dibuat dalam ketentuan teknis dapat sejalan dengan kebijakan perolehan dan kegiatan prioritas pemerintah pusat.

Demikian pengantar ini kami sampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan hal rencana kerja hari ini. Saya rasa kepada teman-teman Komisi IV hal yang sudah ditanyakan tidak perlu ditanyakan lagi ya, kita singkat-singkat karena hari ini kan hanya pengambilan keputusan.

Saya persilakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Terima kasih, Pimpinan.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua, Bapak-Ibu Anggota Komisi IV DPR RI,

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan Rapat Kerja antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Komisi IV DPR RI.

Sesuai agenda rapat kerja hari ini, perkenankan kami menyampaikan penjelasan mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran KKP, serta usulan program-program yang akan didanai oleh dana alokasi khusus bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2024 yang merupakan tindak lanjut dari rapat kerja tanggal 31 Agustus 2023 dan rapat dengar pendapat pada 5 September 2023.

Ketua dan Wakil Ketua, serta para Anggota DPR RI Komisi IV yang kami hormati,

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional nomor dan Menteri Keuangan Nasional Menteri Keuangan tentang pagu anggaran belanja K/L dan DAK tahun 2024 serta penyelesaian RKA K/L TA 2024, KKP mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar 7,04 triliun dengan komposisi belanja operasional sebesar 2,99 triliun dan belanja non operasional sebesar 4,05 triliun. Rincian alokasi anggaran berdasarkan unit kerja Eselon I dan berdasarkan program sebagaimana bahan paparan yang kami sampaikan.

Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dan masukan yang diberikan dan kami telah menindaklanjuti masukan dan arahan Komisi IV DPR RI pada saat FGD, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat. Untuk itu, kami mohon dukungan untuk mengusulkan tambahan anggaran tahun 2024 sebesar Rp986,4 miliar guna mendukung pembangunan perbatasan, menambah kampung nelayan maju, bantuan pupuk untuk usaha budidaya, Sarpras unit pembenihan rakyat, sehingga usulan pagu anggaran KKP menjadi sebesar 8,03 triliun. Rincian kegiatan usulan tambahan pagu anggaran sebagaimana bahan yang telah kami sampaikan.

Ketua, Wakil Ketua, dan para Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,

Terkait dengan dana alokasi khusus fisik bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2024, KKP mengusulkan alokasi sebesar 1,3 triliun terdiri dari DAK KKP, DAK KKP untuk provinsi sebesar 489,13 miliar dan DAK KKP untuk kabupaten kota sebesar 820,77 miliar untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur serta mendukung ketahanan pangan.

Demikian yang dapat kami sampaikan pada rapat kerja kali ini. Kami mohon dukungan Komisi IV DPR RI terhadap usulan rencana kerja dan anggaran KKP tahun 2024. Seluruh saran, masukan, dan rekomendasi dari Komisi IV DPR RI akan menjadi acuan atau perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2024.

Terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Om shanti shanti shanti om.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasannya.

Jadi nanti untuk CPCL yang belum, belum diserahkan kan sudah ada kesepakatan *time limit*-nya. Nanti saya berharap Kapoksi-Kapoksinya mumpung masih ada berapa hari untuk diingatkan.

Silakan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Bu Maria. Kenapa? atau Pak Sutrisno, singkat atau kalau belum siap Gerindra, siapa Gerindra? Iya.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc):

Baik.

Terima kasih Pak Ketua.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan, dan

Salam Indonesia Raya,

Kepada yang terhormat khususnya Pimpinan kita yang sangat kita banggakan dan teman-teman Anggota Komisi IV,
Pak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia,
Pak Sekjen KKP dan pejabat Eselon I beserta jajarannya,
Direktur Utama Perikanan Indonesia,
Direktur Utama PT Garam (Persero), dan
Direktur Utama PT RNI,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa hadir ditempat ini dalam keadaan sehat dan kami juga mendoakan semoga Pak Menteri cepat sehat dan aktif kembali.

Ibu dan Bapak sekalian,

Dari Partai Gerindra pada prinsipnya kami mendukung dan sangat mendukung usulan tambahan anggota KKP tahun 2024 sebesar 986 miliar dari pagu anggaran tahun 2024 sebesar *tujuh triliun nol empat enam*, sehingga alokasi anggaran KKP tahun 2024 menjadi 8,033 triliun. *Nah*, tapi kami dari Partai Gerindra menginginkan Bapak Menteri dan jajarannya bisa mengkhususkan/prioritaskan kepada masyarakat pelaku utama sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.

Yang kedua, kami juga mendorong sekali sesuai dengan kebutuhan bantuan dari KKP untuk kebutuhan para nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.

Yang ketiga, kami ingin mendorong Kementerian KKP ini bisa meningkatkan program pembuatan pakan ya, Pak, yang dari lokal. Jadi kalau bisa, Pak, banyak sekali eceng gondok yang menjadi gulma itu sebetulnya bisa dijadikan pakan ikan. Kami juga mendorong sekali penumbuhan budidaya lobster, Pak. *Nah*, mohon ada Bimtek atau perlu magang ke negara lain supaya bisa meningkatkan ekonomi kita.

Kemudian yang terakhir ini, Pak. Kami mendengar dan mengikuti perkembangan bahwa banyak sekali pedagang, perdagangan orang Pak TPPO terhadap anak buah kapal, Pak, ABK yang berasal dari Indonesia kemudian bekerja di tempat-tempat perikanan asing. *Nah*, ini mohon ada sosialisasi karena yang direkrut itu kebanyakan di kampung-kampung nelayan yang pengetahuannya sangat rendah sehingga ini sangat merugikan keluarga kita yang ada di kampung-kampung.

Kemudian ini, Pak, jalur khusus bagi penerima pendidikan atau advokasi untuk sekolah-sekolah. Mohon diprioritaskan kepada pelaku utama di sektor kelautan dan pembudidaya ikan. Khususnya untuk kota Bogor dan Cianjur *nih*

banyak sekali ekspor kita untuk budidaya ikan hias yang belum dapat fasilitas yang memadai.

Terima kasih, Pak, hanya itu.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Hanan, mewakili Fraksi Golkar.

F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Pimpinan, Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Pak Menteri beserta para Dirjen, Kepala Badan yang saya hormati,
Direktur ID Food beserta jajarannya yang saya hormati,

Pertama, tentunya Fraksi Partai Golkar mendukung program yang telah disusun ini program kegiatan sesuai dengan tindak lanjut rapat sebelumnya. Namun, terkait dengan anggaran tambahan, usulan anggaran tambahan tahun 2024, kami mohon untuk diinformasikan lokasi maupun calon misalnya di sini ada tambahan-tambahan terkait bantuan bioflok, excavator, excavator 10 misalnya tambahannya. Kalau yang di awalnya cukup untuk semua Dapil misalnya kan, ini ada 10, 10 ini mau kemana seperti itu.

Kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan untuk 2024, harapan kami adalah sosialisasi maupun Bimtek itu dilaksanakan seawal mungkin. Usulan teman-teman pada beberapa kesempatan mengharapkan di bulan Januari bisa dilaksanakan. *Nah*, sehingga proses pelaksanaan fisik di lapangan bisa benar-benar dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Harapannya adalah Bimteknya di bulan Januari, kemudian pengadaan-pengadaan sarana pendukung dan sebagainya ini di bulan berikutnya, ya mungkin di Maret, April. *Nah*, sehingga bisa benar-benar dilaksanakan sesuai dengan yang kita harapkan.

Kemudian yang ketiga. Kami mohon untuk memberikan perhatian kepada kegiatan-kegiatan, program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan beberapa tahun sebelumnya tetapi tidak diteruskan baik yang melalui DAK maupun APBN Murni. Contohnya saja ini Pak Ketua di Lampung, di Rawa Jitu Utara itu tahun 2018 ada dibangun TPI, kemudian tidak diteruskan sampai hari ini ya oleh itu DAK-nya, Pak. Oleh karena itu, harus ada arahan-arahan dari, dari pusat supaya kabupaten itu bisa mengusulkan untuk kelanjutannya.

Saya kira ini Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Hanan mengenai usulan tadi Januari di Bimtek itu tergantung bukan tergantung Bapak-Bapak di sini, kadang-kadang Anggotanya kan telat mengirimkan suratnya, usulannya, termasuk CPCL.

Yang kedua tadi masalah DAK, seberapa konsentrasinya dinas-dinas itu untuk DAK ini? mereka kan kadang-kadang santai-santai aja pokoknya nanti masih lama, nanti masih lama kan begitu yang terjadi. Ya.

Nasdem, Pak Abdullah Tuasikal.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Siap, Ketua.

Yang saya hormati Pimpinan, rekan-rekan Anggota,
Juga yang saya hormati Pak Menteri beserta jajarannya,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Pak Ketua, kita udah dalam minggu kemarin minggu ini kita udah masuk Raker dua kali. Juga ada kegiatan-kegiatan RDP pun sudah kita jalankan dan kemarin ya kemarin kita baru RDP, banyak materi yang kita udah sampaikan dan saya kira materi hari ini juga sama ya. Untuk itu, kan ada jawaban-jawaban secara bisa maupun tertulis. Untuk itu karena jawabannya secara lisan itu, maka pertanyaan penyampaian kita juga bisa berulang-ulang. Tapi saya kira mudah-mudahan dengan adanya RDP kemarin, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua bila perlu belum jam 12.00 udah selesai.

Pada intinya, kami mengapresiasi pagu anggaran KKP tahun anggaran 2024 yang mengalami kenaikan, kami berharap dengan peningkatan anggaran tersebut diikuti dengan peningkatan kinerja dan penyerapan anggaran. Itu yang pertama.

Yang kedua, kami juga mengapresiasi kinerja KKP dalam realisasi PNBPN seperti yang kita ketahui bersama salah satu upaya KKP untuk meningkatkan PNBPN sektor Kelautan dan Perikanan adalah kebijakan penangkapan ikan terukur.

Kami kira bahwa penangkapan ikan terukur ini ya realisasinya sudah mulai jalan, ya Pak Menteri sudah jalan ya penangkapan terukur Pak, belum ya? ini kita tunggu mau regulasi ya? ya, semoga regulasi juga sudah harus selesai. Dan kita harapkan juga ada infrastruktur penangkap ikan terukur ini mudah-mudahan menjadi perhatian ya agar pelabuhan penerapan pendaratan ikan itu juga bisa, artinya bisa mewadahi kegiatan-kegiatan pembongkaran dan lain-lain.

Yang ketiga, juga kemarin saya juga udah usulkan juga soal kapal pengawasan ini, ya. Di dalam kegiatan ini juga ada berapa kapal yang disiapkan menjadi program, tapi kami harapkan agar wilayah timur khususnya di Maluku itu, itu harus ya menjadi perhatian. Saya kira itu.

Lalu yang keempat ya, Pak. Ini di waktu saya ke Ambon ini di BP3 ya BP3/Badan Penelitian dan Pendidikan KKP Kota Ambon. Di sana itu udah ada kegiatan-kegiatan pembenihan lobster dan menurut Kepala Balainya keberhasilannya udah sekitar 90-an persen, tinggal lisensinya. Saya harapkan agar kalau dapat ya dari KKP bisa, bisa bersama-sama ya dengan atau ya dengan Kepala Balai yang ada di sana itu agar kegiatan pembenihan lobster ini ya itu menjadi perhatian. Itu Pak Ketua ya, ya yang ada-ada ini jadi perhatian lebih bagus. Kita *nggak* terlalu yang *gede-gede* lah, *gede* itu nanti ya.

Saya kira itu aja Pak Ketua, Pak Menteri. Demikian.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya PDI Perjuangan, Pak Sutrisno.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si):

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi, dan
Salam sejahtera buat kita sekalian,

Pimpinan beserta rekan-rekan Anggota Komisi IV,
Pak Menteri beserta jajaran, dan para BUMN Pangan,

Singkat saja Pak Menteri, urusan rencana anggaran sudah dibahas kemarin. Hanya dua hal yang ingin kami sampaikan.

Yang pertama, terkait dengan kebijakan penangkapan ikan terukur ya di tahun 2022, hasil BPK itu kan menampakkan PNBP-nya 1,871 ya. Ya, sebenarnya ini belum, belum mulai kan, baru mau mulainya ini kan di awal 2023 ya. Ya, apa namanya proses maksudnya proses persiapannya ya kan, ya PP-nya sudah keluar.

Yang saya pertanyakan, apapun yang dilakukan, berapapun uangnya, tentunya kan *ending*-nya berapa bagaimana hasilnya. Ini di perikanan tangkap *nih* Pak, Pak Menteri ya, kok target... target.... target produksinya di tahun 2024 ini itu hanya 6 juta. Padahal sebelumnya itu kan diprediksikan 8 juta ton gitu, ini yang menjadi persoalan. *Nah*, kendala apa itu terjadi? Ini kan ini kaitannya kan dengan permasalahan para nelayan-nelayan kita, apakah nelayan kita semangatnya berkurang atau ruangnya terganggu dengan adanya kebijakan apa namanya apa penangkapan ikan terukur ini. Ini mohon untuk dijelaskan.

Kemudian yang kedua, Pak Menteri. Kunjungan kami kemarin ke Waduk Cirata di Cianjur sana ya, itu diinformasikan dilaporkan bahwa kadar air itu sudah positif mengandung air raksa gitu ya. *Nah*, rakyat kami di Dapil kami di Sumedang, Majalengka itu, itu apa namanya ikannya itu kan diambil dari Cirata.

Nah, pertanyaannya adalah bagaimana langkah pengamanan ya agar jangan sampai kemudian ya maaf dampak pada kesehatan rakyat kita akan, akan terganggu dan pasti terganggu bahwa untuk menangani persoalan itu kemarin diinformasikan bukan hanya di... di... di... di ikannya, malah di eceng gondoknya pun juga sudah terproteksi ada, ada kadar air raksanya.

Kami pikir itu saja, Pak Pimpinan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima Kasih.

Pak Edward.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jangan komplain masalah bibit, sudah jelas, bibitnya sekarang bagus.

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Siap, Pak Ketua.

Yang saya hormati Pimpinan Komisi IV beserta Anggota Komisi IV,
Pak Menteri beserta Sekjen dan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Jadi, ini yang sudah disampaikan dalam materi yang diberikan oleh KKP ini saya kira sudah jelas, terang benderang semua, kami paham betul ini. Apa yang sudah kita sepakati sebagian besar sudah dituangkan di sini dan kami puas kalau kami melihat apa yang sudah direncanakan di sini, karena ini sejalan dengan apa yang telah kami sampaikan dan masukkan dari para Anggota Komisi IV.

Yang perlu kami sampaikan lagi tambahan di sini bahwa telah terjadi kemiskinan ekstrem itu justru di daerah-daerah pesisir para nelayan. Makanya, kira-kira solusi apa yang akan diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, ini faktor kemiskinan ini menjadi topik setiap kali ada kunjungan selalu diperbincangkan mengenai faktor kemiskinan.

Dua, mungkin menyangkut sampah plastik. Sampah plastik ini sudah menjadi budaya atau kebetulan orang sering membuang sampah khususnya sampah plastik itu ke sungai atau ke laut. Ini menjadi preseden buruk bagi kita Indonesia karena bukan hanya di Timur saja, di Bali juga banyak itu sampai plastik padahal itu daerah wisata buat kita, di Labuan Bajo juga banyak. Saya kira kita harus menemukan satu solusi yang betul-betul berkesinambungan, jadi jangan orang ngomong baru kita bikin bersih sampahnya. Kalau bisa diberikan penugasan khusus kepada ya dari Dirjen-Dirjen Tangkap *kek*, atau Dirjen Kebersihan Laut *kek* untuk mengatasi ini, karena ini menjadi cermin daripada keberadaan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini. Karena ini menjadi topik yang serius di bahas di pertemuan-pertemuan internasional.

Dan juga mengenai perluasan kawasan konservasi tentang di laut ini, ini harus diperjelas lagi sudah sejauhmana konservasi yang dicapai untuk perlindungan-perlindungan habitat kita yang ada di laut sehingga kita mengeksplorasi kekayaan alam ini, jangan sampai kelewatan, harus ada perlindungan juga, harus ada perhitungan yang mantap.

Satu lagi yang perlu saya tanyakan menyangkut pasar ikan internasional dan pasar ikan modern itu perbedaannya apa, Pak? Kalau internasional mungkin *scope*-nya lebih besar atau, atau fasilitas yang disiapkan di situ atau apa yang. Dan akan di, ditempatkan di mana yang pasar ikan yang bertaraf internasional ini? Kalau pasar ikan modern sudah itu di mana di Muara Baru, Bandung, Palembang, dan lain-lain.

Jadi, ini mohon sedikit diberi apa penjelasan sehingga kami juga memahami investasi untuk pasar ikan internasional ini seperti apa. Mungkin ke

depan mungkin harus ada ya, karena kita lagi menggiat-giatkan produksi ikan kita untuk bisa lebih bersaing ke luar dan dalam rangka meningkatkan PNBP kita.

Yang satu lagi, kami ingatkan bahwa untuk meningkatkan baik produksi maupun keadaan kebersihan di laut dan kita butuh penyuluh, penyuluh perikanan yang banyak dan harus betul-betul paham. Jangan sampai banyak tapi SDM-nya malah kurang, jadi harus berimbang, kuantitas dan kualitas harus sejalan. Jadi, kami sangat mendukung dengan adanya Bimtek-Bimtek ini benar-benar memberikan nilai tambah khususnya kepada manusianya, alamnya tidak usah Bimtek lagi, itu dia hidup sendiri sudah itu dia, cuma ya kita konservasi dan pemeliharaan ini perlu.

Dan juga mengenai bantuan, saya lihat ini bagus sekali ini karena ini kelihatannya mau menjurus kepada budidaya, perikanan budidaya. Jadi, sangat ya sangat bagus, karena kita tidak semata-mata mengharapkan dari laut tapi budidaya juga perlu kita galakkan, jangan sampai nunggu sampai ikan di laut sudah kurang atau sudah kena penyakit itu, nuklir dari Jepang baru kita mau pelihara di darat. Ini positif dan saya sangat memberikan apresiasi bahwa program dan kerja sejalan.

Terima kasih Pak Ketua. Hanya ini saja. Terima kasih Pak Menteri dan jajarannya.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Fraksi Demokrat, Pak Suhardi Duka.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati Pimpinan, Anggota Dewan yang terhormat,
Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Sekjen, dan seluruh jajaran Eselon I dan Direktur PT Perikanan Nusantara, dan ID Food,

Pada prinsipnya pembahasan kita sudah mencapai titik-titik kesepakatan, hanya memang ada beberapa penekanan-penekanan yang perlu kita berikan *support*. Saya ingin sampaikan kepada Pak Menteri bahwa ada program yang kita laksanakan 2023, itu memang bagus bisa mengatasi infrastruktur dasar, kebutuhan dasar dari kampung-kampung nelayan itu disebut dengan Kalaju. Saya melihat bahwa ini mampu mengatasi hal yang dasar di desa-desa nelayan kita. Kemarin saya meminta supaya ditambah menjadi dua desa per ya wilayah dan

Pak Sekjen sudah memberikan jawaban bahwa memang kemampuan anggaran kita belum mencukupi.

Dengan demikian, Pak Pimpinan, saya minta jika sekiranya ada tambahan dan saya sependapat saya setuju dengan usulan tambahan dari KKP ini, Kalaju masuk menjadi salah satu prioritas untuk mendapatkan alokasi anggaran kurang lebih 45 miliar. Dan memang di rincian usulan tambahan ini juga sudah di dalam, olehnya itu saya ucapkan terima kasih karena sudah masuk. Hanya masalahnya, kan usulan kita 986 miliar kalau disetujui hanya 200 miliar ya tetap Kalaju di dalam, itu yang saya minta, iya. Walaupun kecil persetujuannya tetap menjadi prioritas terus ini Kalaju.

Yang kedua, Pak Menteri. Saya sudah berusaha membantu dan ternyata elevasinya rendah menurut tim dari KKP, maka saya harus mencari lagi yang elevasinya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Pak Menteri dan saya sudah dapat. Hanya saja dia tidak berada di bibir pantai, dia kurang lebih 300 meter dari bibir pantai. Kalau itu masih bisa, berarti kita sependapat hari ini.

Saya kira demikian, Pak Menteri.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam,

Selanjutnya Pak Hermanto, 1 menit.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Nah, ini lain nih, memang ditetapkan 1 menit ini Pak Menteri, jadi saya agak susah kalau 1 menit.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Bismillahirrahmanirrahim,*

Yang terhormat Pimpinan Anggota Komisi IV,
Pak Menteri bersama Sekjen dan Dirjen-Direktur, dan ID Food,
Hadirin semua,

Pertama saya ingin menyampaikan bahwa apa yang menjadi pembahasan dalam RDP ya pada hari-hari yang lalu kami minta supaya ada komitmen untuk pelaksanaannya ya, bukan hanya terkait dengan pelaksanaannya juga dengan

tepat waktunya yang sesuai dengan saran dari semua Anggota yang hadir dalam RDP itu. Fraksi Partai Kesejahteraan memandang bahwa ini sangat penting karena terkait dengan soal efektivitas dan efisiensi dari agenda-agenda kerja dan program dan anggaran yang harus kita realisasikan.

Kemudian yang kedua, kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas berbagai program yang sudah diserap dalam berbagai pembahasan-pembahasan semoga program-program ini betul-betul menjadi komitmen kita bersama.

Yang ketiga, kami memandang perlu bahwa anggaran sebesar 8 triliun, kemudian juga tambahan 983 miliar sebagai tambahan kami memandang itu sangat memberikan dukungan ya terhadap proses pelaksanaan program-program dan diharapkan ini adalah jadi *booster* ekonomi untuk pertumbuhan dan kesejahteraan nelayan.

Dan kemudian yang terakhir, kami berharap juga bahwa terkait dengan soal waktu, kami juga menyepakati bahwa kalau bisa ada skala prioritas mana yang lebih bisa didahulukan dan itu adalah berkaitan langsung dengan nelayan dari aspirasi yang diperjuangkan oleh Anggota DPR Komisi IV ini. Itu, itu menurut kami itu lebih diprioritaskan.

Demikian, Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Memang Pak Hermanto paling baik, dibilang 1 menit, setengah menit cukup.

Pak Alimin. Saya minta Pak Alimin. Karena yang jarang datang, jangan kasih ngomong.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Eenggak, enggak, enggak, enggak boleh begitu.

Silakan Pak Alimin, saya *enggak* perlu bicara kok.

F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH):

Terima kasih Pimpinan.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV,

Juga Pak Menteri, Pak Sekjen, ada dan para Eselon I dan semua yang hadir dalam ruangan ini,

Yang pertama, kami dari Fraksi PAN tentu saja bersyukur dan berterima kasih dan mendukung, Pak, karena melihat sesuatu yang bisa mengharapakan perubahan yang selama ini ya penduduk kita nelayan ini yang paling banyak mengalami apa ekstrim kemiskinan itu dan sekarang banyak harapan baik pemda dan rakyat kepada KKP ini. Antara lain dari segi perhitungan Pak Menteri, saya juga baru tahu, buat tanah di darat kalau satu hektar buat kebun singkong dibanding dengan buat kolam lele jauh lebih asal pakan dan pasar, tinggal dibuktikan katanya. Kalau dari singkong cuma berapa hasilnya satu kali panen *eh* kadang-kadang cuma satu tahun satu kali. Kalau ikan, lele itu bisa tiga kali panen, satu hektar bisa sampai 50 kolam.

Jadi, kalau betul-betul pakan dan intensif modal untuk bibit mereka yakin itu akan lebih mensejahterakan petani ketimbang menanam yang sudah tradisional singkong, padi, segala macam. Jadi, harapan saya dengar dari bupati langsung bahwa program-program KKP ini termasuk yang terakhir Pak Bupatiya datang langsung ketika kita dapat excavator karena melihat kemungkinan di daerah bukit-bukit itu lebih mudah dibuat kolam dengan ada bantuan hal-hal seperti itu. Walaupun, satu bupatinya sangat berterima kasih. Dan mudah-mudahan program-program KKP ini baik yang di daerah maupun di laut betul-betul bisa membantu kesejahteraan rakyat kita.

Yang sangat menarik itu ketika BBL, siapa yang datang dari kelompok waktu itu mempersoalkan benih apa lobster. Kalau saya melihat memang betul Pak, harus kita dari pemerintah, negara, jadi bukan hanya petani yang menggiatkan untuk membudidayakan, membesarkan lobster itu. Sebab kalau tidak, memang kita di sini cuma jadi calonya aja, membeli dari petani dan mereka yang membesarkan negara lain. *Nah*, kalau dia bukan yang kita sendiri yang membesarkan, menurut saya walaupun ada yang mengatakan kita kalah bersaing karena soal *transport*, tapi sumbernya bibitnya kita punya mereka *nggak*, masa' kita masih kalah.

Nah, kalau memang betul ini pendapat kita, maka sudah waktunya kita sekarang sebagai negara untuk menyelamatkan Rahmat dari Tuhan yang di negara kita di tempat lain tidak ada. Ini saya kira sesuatu yang sangat berharga buat negara kita, tapi selama ini sia-sia orang lain yang menikmatinya. Karena tidak ada yang betul-betul seperti negara lain membudidayakan yang membesarkan lobster itu. Jadi menurut saya barangkali tidak usah kita terlalu keras menahan tidak boleh ekspor, tapi sebetulnya akan berhenti sendiri ekspor itu benur kalau memang di dalam ini ada yang membelinya dan membudidayakannya.

Itu saya harapannya, Pak Ketua. Kita berharap KKP ini salah satu departemennya bisa menambah kesejahteraan rakyat dan ini tanggapan dari masyarakat di daerah.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Jadi, Menteri. Kalau orang Lampung itu selalu berkata, kalau bukan kita siapa lagi. Dan perlu Pak Alimin ingat, kemarin dalam Raker dan RDP sudah masuk dalam kesimpulan untuk budidaya benih lobster, ya. Kalau Pak Alimin mau budidaya lobster juga bisa, kalau alatnya *enggak* ada nanti saya bantu.

Loh, kan saya berharap Pak Alimin kembali lagi ke sini. Maksudnya? Mau ngomong Rud? Satu menit, Rud.

Sudah semua. Anggota ada lagi masukkan? Iya. Pak Johan, tadi sudah saya WA.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T):

Oh, siap, Pak Ketua. Insyaa Allah besok selesai.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Ketua, Para Wakil Ketua,
Pak Menteri beserta seluruh jajaran,
Anggota Komisi yang saya hormati,

Pertama, tentu menegaskan kita setuju dengan ajuan anggaran ini, termasuk tambahannya, Pak Ketua, iya. Cuma saya ada sedikit catatan.

Pertama, dari Dapil, Pak Ketua. Ada beberapa usulan pemerintah yang sudah tertunda 2 tahun, Pak Ketua. Anggarannya sudah tersedia, tapi masih terblokir di Dirjen Keuangan katanya, yaitu tentang pembangunan satuan pengawas di Tanjung Pengamas di Sumbawa, Pak Ketua, itu yang pertama.

Yang kedua, saya berharap juga kan sudah ada SK soal desa wisata-desa wisata itu, Pak. Kita tidak boleh menurut saya hanya bagus di judulnya saja, tapi kemudian tidak ada isinya. Terlalu banyak judul kita, Kampung Nelayan Maju, ini, segala macam desa wisata, tapi kemudian isinya tidak ada. *Nah*, salah satu penunjang dan kebetulan salah satu desanya itu ada di kampung saya Pak Menteri, yaitu Desa Wisata Bahari Labuhan Jambu.

Ada juga usulan yang sudah disampaikan melalui apa namanya Dirjen PRL, yaitu soal apa namanya Dermaga Apung, di sana itu ada satu komunitas hiu paus yang banyak didatangi oleh para wisatawan termasuk mancanegara. *Nah*, jangan kemudian kita permalukan wajah kita itu hanya untuk bersandar mereka kemudian tidak memiliki tempat bersandar, itu yang pertama yang berikutnya dari Dapil.

Selanjutnya, soal komitmen bibit 1 juta itu, Pak. Itu kadang kalau kita minta bibitnya tidak tersedia yang satu juta per Anggota, Pak Ketua, itu kalau dimintai tidak tersedia. Saya kontak langsung dengan apa namanya dengan BBI saja, oh belum ada arahan dari, dari direktur. Di telpon direktornya belum ada arahan dari dirjen saya *ndak* tahu, saya berhenti di situ, Pak, saya takut jawabannya dirjennya belum ada arahan dari menteri karena saya tahu bahwa menterinya tidak begitu, Pak Menteri ini baik. Terima kasih Pak, Pak Wahyu Trenggono.

Yang berikutnya Pak, kita kan sering mengkampanyekan makan ikan, iya. *Nah*, sementara angka makan ikan kita itu tidak memenuhi target yang dibuat oleh kementerian sendiri. Tercapai 56, sementara target kita 59. Padahal angka produksi kita melimpah, jadi ada ikan melimpah, Pak, tapi *ndak* bisa dimakan oleh orang, ya kan. Angka makan ikan tidak memenuhi target, sementara produksi melimpah. Kan ini perlu kita pikirkan sebabnya, Pak, ada ikannya bisa karena masyarakat tidak bisa membeli, bisa karena rantai jualnya itu panjang.

Contoh misalnya di tempat saya, Pak, di kampung, di Kabupaten Sumbawa itu Pak dari 24 kecamatan itu 18 kecamatannya kecamatan pesisir Pak. Ada enam kecamatan itu yang ada di gunung, *nah* bisa saja mereka tidak bisa mengakses itu mungkin karena ya mungkin perlu bantuan-bantuan apa namanya mobil dingin gitu, Pak, sehingga masyarakat gunung pun bisa makan ikan. Dengan demikian acara gemar makan ikan kita bukan hanya ada di pesisir dan di kota-kota, tapi juga bisa menjangkau. *Nah*, tahun kemarin saya bawa dirjennya Bapak ke gunung, *alhamdulillah* menikmati perjalanan itu.

Jadi, mungkin itu, Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

INTERUPSI F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Interupsi, Ketua. Suhardi.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Suhardi.

Jadi, slogannya gemar makan sehat, “makan ikan sehat, makan ikan kuat”. Tapi kadang-kadang ibu-ibu juga males ngebersihin ikan, makanya Indomie lebih gampang.

Silakan, Pak Suhardi Duka.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Iya, minta maaf Pak Ketua saya lupa.

Khusus untuk DAK, ini biasa dikasih ada namanya DAK reguler dan ada juga DAK aspirasi. Biasanya di awal, DAK reguler 10 miliar diberikan kepada satu kabupaten. Setelah masuk DAK aspirasi 6 miliar, DAK regulernya dikurangi menjadi 4 miliar. Jadi menjadi tetap, tetap dia punya total DAK menjadi 10 miliar, ya buang-buang saja ini kalau begini.

Jadi, saya minta ini, Pak, yang menangani DAK, supaya tetapkan DAK regulernya, tidak mengurangi dana aspirasi DAK aspirasi yang masuk. Ini pesan-pesan dari Pak Salim.

Terima kasih, Pak.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Ketua.

Pak Ketua dikit, lupa juga. Pak, dikit aja ya, boleh ya.

KETUA RAPAT:

Tadi katanya *nggak* mau ngomong.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Nggak, dikit.

KETUA RAPAT:

Bioflok ini udah abis jatahnya ini diambil.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Dikit, dikit. Jangan marah-marah *dong*.

Pak Ketua, terima kasih. Pak Menteri dan Pak Dirjen.

Saya tadi, mana Johan, oh. Menindaklanjuti yang disampaikan oleh Saudara saya, Johan karena satu Dapil. Pak Menteri izin berkenan. Memang di kabupaten Sumbawa khususnya di Pulau Sumbawa itu ada yang kami miliki wisata hiu paus. Jika berkenan, kalau memenuhi persyaratan yang disampaikan oleh pemerintah untuk Dermaga Apung itu mungkin sangat, sangat dibutuhkan gitu. Karena memang setiap hari orang itu harus jalan dari darat ke dalam untuk bisa menuju ke tempat selanjutnya. Jadi udah tengah malam, karena memang kalau ke sana itu harus jam 01.00 pagi, jadi kasihan. Jadi tapi kalau ada Dermaga Apung mungkin Insya Allah akan lebih, karena itu di beberapa di Indonesia yang punya itu ya Gorontalo dan di NTB khususnya di Pulau Sumbawa itu ada di situ, tapi sangat tidak, tidak elok kalau turis itu datang tengah malam jam 01.00 kalau berangkat itu mana ke patok ikan dan lain-lain karena *enggak* ada Dermaga.

Itu aja Menteri dan Pak Victor mohon diperhatikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau bicara paus, di Lampung juga ada paus.

Pak Victor, kalau tahun ini geser-geseran kan itu berapa mahal *sih*? Itu aja udah kasih eksekusi langsung, bisa?

Terus, bagaimana saya *enggak* baik sama Fraksi PAN walaupun termasuk Fraksi PKS, walaupun kita tidak kerja sama.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Kan masih lama, belum apa-apa.

KETUA RAPAT:

Langsung dieksekusi tahun ini juga. Padahal saya pernah minta sama Victor waktu itu *enggak* dikasih untuk lomba-lomba di Lampung.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Saya, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya. Satu menit Bu.

F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):

Setengah menit, Pak Ketua.

Terima kasih Pak Ketua, Pak Menteri, dan para jajaran,

Yang pertama, mungkin pertanyaan kami yang kemarin-kemarin harap ada penjelasan atau jawabannya tertulis Pak Menteri dan Pak Sekjen agar kami tidak bertanya ulang-ulang, Pak Ketua.

Yang kedua, memang penjelasan soal PIT. Ini kalau misalnya yang kemarin saya sampaikan bahwa kapal-kapal 30 GT ke bawah itu harus menjadi bagian juga dari program PIT setelah saya dalam, maka memang kemarin saya sampaikan ada *win-win solution*-nya.

Yang ketiga, soal LIN. Memang kita, saya dengan Pak Dullah dan mungkin Bu Alien kita perlu bertemu khusus dengan Pak Menteri Pak Ketua, agar apa yang harus kita perbincangkan nanti itu benar-benar dia bermanfaat untuk nelayan-nelayan ataupun bagaimana pembangunan-pembangunan infrastruktur perikanan yang akan mendukung, baik PIT ataupun LIN itu sendiri, Pak Menteri, sehingga mungkin sebelum diketuk nanti, kita harapkan ada satu, dua hari ini kita bicara dengan Pak Menteri atau siapalah yang mau kita diskusikan Pak Menteri.

Itu saja, Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau masalah tadi kapal dibawah 30 GT, nanti biar nanti kalau Pak Menteri ketemu didampingi sama Dirjen Tangkap supaya lebih jelas. Kalau masalah LIN sudah dimasukkan dalam kesimpulan rapat ya.

Kalau tidak ada lagi, saya persilakan Saudara Menteri.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd):

Izin, Pak Ketua. Sedikit.

KETUA RAPAT:

Tadi disuruh *ngomong nggak mau*. Iya, gimana.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd):

Baik.

Terima kasih, Pak Ketua. Izin.

Pak Menteri, ini sedikit catatan atau masukan buat Bapak Menteri. Karena dia melihat percepatan pembangunan perbatasan di sini kita melihat dengan anggaran yang kecil ya ini karena perbatasan kita ini daerah Kalimantan Barat di sini juga masuk daerah Aruk, Motaain dan Skouw, nah di sini melihat rincian tidak terlalu besar. *Nah*, oleh karena itu tolong benar-benar dimanfaatkan ya daerah pesisir dan pengembangan desa yang di sini juga dialokasikan cuman tiga lokasi, *nah* ini mudah-mudahan daerah pesisir dan kebutuhan nelayan yang ada di daerah Kalimantan Barat khususnya daerah perbatasan juga harus cepat di bantu juga kan.

Nah, begitu juga dengan kawasan perbatasan dalam pengawasan kapal. Ya, kita melihat, mencermati rincian tersebut juga sangat tidak terlalu besar. *Nah*, oleh karena itu harus benar-benar bisa dimanfaatkan dan bisa menjadikan sumber pendapatan untuk para nelayan nantinya.

Terima kasih.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M):

Sedikit Pak Ketua. Boleh?

KETUA RAPAT:

Nanti.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M):

Kalau Maria itu boleh cepat, kalau saya *ndak* bisa. Oke.

KETUA RAPAT:

Jadi begini, Menteri. Usulannya tadi kan itu kan sesuai dengan Inpres Nomor 1/2019, Inpres Nomor 1/2021. Alangkah baiknya, kalau setiap Eselon I 250 juta potong 500 juta, 500 juta dipotong, dialihkan anggarannya untuk wilayah-wilayah perbatasan, itu diatur oleh kementerian. Jadi, ada penambahan sesuai dengan Inpres yang tadi saya katakan. Misalnya Eselon I 250 juta, 250 juta, kalau ada 10 kan berarti ada dua setengah miliar tambahannya ya, karena kan ini sesuai Instruksi Presiden. Ya, itu diatur oleh kementerian sendiri lah, kita *enggak* usah ikut campur.

Ya, Pak Bupati. Pak Salim.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M):

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya langsung mengingat ikan cepat ikan gabus, lebih cepat tutup rapat lebih bagus.

Tadi menyangkut Pak Suhardi, sambungannya aja, Pak Ketua. Di DAK reguler ada 10 miliar, kabupaten Pak Suhardi ya. Saya udah 8 tahun di Komisi IV Ketua, kabupaten saya *ndak* pernah dapat DAK reguler, ini mungkin ada aspirasi melalui Banggar itu pun ada sedikit. Maksudnya Pak Menteri, Pak Sekjen apa salahnya diarahkan ke Biro Perencanaan andaikan ada reguler kalau bisa di, kalau memang tidak menyalahi aturan ke Dapil kami, itu yang dimaksud Pak Suhardi tadi, supaya nampak kerja sama antara kami dan mitra kami itu lebih baik.

Yang kedua. Dirjen Tangkap, apa yang kita ungkapkan, itu yang kita laksanakan. Jangan kita baik selama ini, nanti ujung-ujungnya akhir jabatan ini kurang baik.

Itu aja Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi Pak Salim ini kalau ngomong santun, santai, tapi agak nusuk. Saya minta Abang pun bantu usulan penambah anggarannya, maka nanti yang sebagai *bargaining*-nya mungkin bisa di DAK regulernya ditambahkan. Jadi, kalau Abang di Banggar *enggak* ada manfaatnya juga *entar* udah untuk Komisi IV ya terserah Abang gitu.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M):

Sedikit Ketua, saya respon.

Sebenarnya yang kami inginkan kawan-kawan kami dari Banggar, memang ada pertemuan, Pak Ketua. Saya tahu Pak Ketua sama Pak Sekjen sangat dekat bisa langsung ke Ketua Banggar.

KETUA RAPAT:

Saya *enggak* bisa langsung Pak. *Enggak* pernah ketemu saya sama dia.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M):

Namun kalau sudah diungkap sama kami yang dari Komisi IV mewakili Komisi IV di Banggar ini, kan kami bisa suarakan, ini kan tidak pernah Pak Ketua. Data dikasih melalui Pak Sekjen, itulah tugas kami, Banggar mewakili Komisi IV ini memperjuangkan anggaran yang di mitra kami, Pak Ketua, ini bahan aja *ndak* ada sama kami.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Demikian pertanyaan, tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV.

Saya persilakan Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan untuk merespon, menjawab termasuk tadi Dirjen Budidaya yang Pak Johan, kemudian yang lain-lain. Silakan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Terima kasih, Ketua, Pimpinan.

Beberapa pertanyaan soal yang paling penting saya kira. Yang, yang pertama soal jawaban yang lalu. Jawaban lalu sudah kami kirim Ibu, sudah kami kirim kemarin, kemarin sudah kami kirim mungkin belum sampai ke para Anggota, mudah-mudahan hari ini sudah sampai.

Lalu yang berikutnya adalah soal kuota, soal target produksi. Kenapa produksi perikanan tangkap di tahun ini ditargetkan lebih turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Kita punya lima kebijakan utama yang kita yakini lima kebijakan ini akan menjadikan kita menjadi negara yang *sustain* khususnya di sektor kelautan yaitu soal konservasi, penangkapan terukur berbasis kuota, lalu budidaya. Terus kemudian keempat pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, ini juga karena semua ini lawannya adalah soal desakan ekonomi. Terus kemudian yang terakhir adalah soal pembersihan sampah laut yang tadi Pak Edward juga pertanyakan.

Nah, penangkapan ini memang kita harapkan ke depan itu harus semakin menurun, Pak, kenapa? karena memang kalau jadi yang kita utamakan adalah kualitas sebenarnya. Laut kita ini kan ikannya itu kan sebetulnya luar biasa banyak, jadi pola yang sekarang ini terjadi masih dengan cara yang lama itu kan penangkapannya bebas saja jadi yang kecil-kecil pun juga apa juga tertangkap gitu.

Lalu yang berikutnya, kita berharap kita harus, harus menjadi *champion* sebetulnya ke depan itu melalui budidaya, Pak. Satu contoh Norway saja satu ikan apa namanya salmon itu ekspor dia itu sebelum Covid itu kira-kira 8,3 miliar US Dollar 1 tahun, itu Norway. Dia risetnya lama memang, tetapi ketika itu dijalankan dia menjadi juara gitu. *Nah*, kita menginginkan juga sebetulnya Indonesia ini variasinya kan begitu banyak, ada dan ikannya sangat dibutuhkan juga gitu. Contoh sidat saja misalnya, itu *market*-nya begitu besar, tidak usah dalam, tidak usah luar negeri, dalam negeri juga, tapi kita belum juga kemampuan yang betul melakukan budidaya ini yang salah satu kita lakukan sehingga ada 5 komoditi yang kita yakini itu akan menjadi satu unggulan kita dalam 5 tahun ke depan mudah-mudahan, itu udang, lobster, kepiting, lalu kemudian tilapia, tadi kalau Pak Alimin bilang di darat itu yang singkong dirubah itu saya kira itu menjadi konsen kita tilapia, tilapia itu nila, Pak. Terus kemudian yang ke-5 rumput laut.

Ini 5 ini kalau kita bisa kuasai betul dalam 5 tahun ke depan, kita itu masih lemah sekali di dalam penyediaan pakan dan pakan kita ini boleh dibilang masih impor. Utamanya adalah dari tepung ikan, kalau di luar negeri itu ikan-ikan yang dia tidak seperti kayak ikan tongkol dan lain sebagainya di luar negeri itu di, dijadikan tepung. Kalau di sini ikan rucah saja itu jadi surimi, Pak, jadi gitu. Ibaratnya kalau saya suka bercanda sama teman-teman Eselon I apa namanya kucing aja *enggak* kebagian gitu, ya kucing aja *enggak* kebagian.

Nah, jadi dan kemudian *demand* lokal kita di sektor perikanan ini kira-kira sekitar 13 juta ton, jadi sangat besar sekali. Ya, inilah saya kira kalau 5 komoditi tadi kita betul bisa kuasai dengan baik, misalnya rumput lautnya kita modifikasi melalui penelitian tentu, bisa menjadi pengganti tepung ikan dan ada beberapa yang sudah bisa dilakukan bersama. Saya rasa ini adalah satu apa namanya satu hal yang memang merubah ya, merubah masyarakat nelayan itu menjadi yang lebih bergeser begitu misalnya tidak mudah. Tapi kalau ini menjadi dukungan kita semua termasuk dari seluruh Anggota Komisi IV, saya kira ini bisa berhasil dengan baik.

Nah, jadi untuk budidaya memang menjadi konsen kita. Jadi, tidak usah khawatir, kita sudah berikan satu model, Pak, dengan segala macam upaya yang kita lakukan. Seperti di tempatnya Pak Darori itu di Kebumen dan beliau masih ngasih jempol terus ke saya, berarti produksinya bagus dan model ini juga akan kita kembangkan. Kalau, jujur saja, kalau punya kemampuan pendanaannya yang bagus, sekarang lagi berputar bagaimana caranya satu tapi kemudian bisa tereplikasi tapi dengan dana yang satu itu pindah-pindah gitu. Pengennya tuh 53 wilayah itu ada semua, maunya begitu kalau ditanya. Tapi *Insyallah* lah di tempat Pak Suhardi juga tadi sudah ada proposal, kemudian di Sulawesi Utara kita sudah, sudah dapat juga, Pak Dirjen Budidaya sudah pergi ke sana, mudah-mudahan tahun ini sudah bisa dimulai dan tahun depan sudah dua lagi di, di resmikan.

Terus kemudian ketiga, soal kampung nelayan. Pernah yang saya sampaikan dahulu itu kampung nelayan ini pembenahannya memang ya butuh

modal besar, tetapi yang kita lakukan ini agak spesifik. Tidak hanya sekedar kampung nelayan kita bantu bukan, tapi kita hitung betul yang dinamakan kampung nelayan itu berapa jumlah nelayannya. Kalau satu kampung syaratnya adalah 80% misalnya, itu kemudian kita cek betul berapa produktivitas mereka. *Nah*, produktivitas ini yang tentu akan menimbulkan *multiplier effect* besar karena pertumbuhannya nanti akan jadi meningkat. Kalau produksi ikannya naik, tentu ekonomi-ekonomi yang lain akan ikut.

Nah, ini yang kita hitung. Lalu kemudian dikeroyok dengan seluruh jajanan Eselon I, Dermaga sama DOB misalnya yang ngebangun tangkap. Lalu kemudian apa namanya tuh *cold storage* Ditjen, Ditjen Daya Saing. Lalu kemudian budidaya misalnya dalam bentuk bioflok atau apa dan lain sebagainya kita lihat jadi tematik sekali memang itu Ditjen Budidaya, dan seterusnya itu kita lakukan.

Nah, tahun ini kita kejar tadinya saya minta 10, tapi setelah kita cek anggarannya memang kurang. Itu kita bikin yang khusus seperti itu, itu dua di Lampung satu dan satu lagi di daerah Papua, di daerah Papua. Tapi tahun depan *Insha Allah* kita akan naikkan lagi, karena kalau model ini jadi akan kita *propose* juga kepada Presiden dan Menteri Keuangan. Contohnya seperti kayak di Kebumen itu, itu dapat apresiasi banyak. Jadi, itu.

Lalu kemudian soal sampah, Pak Edward. Tahun ini kita sediakan anggaran melalui program kita kelima yang namanya Bulan Cinta Laut. Itu sebetulnya *trigger*, karena kalau sampah yang dari darat itu sudah kita koordinasikan di Rapat Menko, dari darat sudah ditahan mudah-mudahan ini bisa berlangsung terus. Tetapi kemudian gerakan melalui nelayan sudah kita lakukan, kita anggarkan 7 miliar di tahun ini dan tahun 2024 kira-kira sekitar 20 *eh* 13 miliar lebih. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu gerakan massal yang nanti dalam kurun waktu tidak bisa balikin tangan Pak, tapi dalam kurun waktu yang cukup saya kira laut kita bisa menjadi bersih.

Demikian saya kira yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memenuhi dan nanti jawaban tertulis akan lebih cepat lagi untuk kami segera kirim.

Terima kasih.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Izin, Pak Ketua.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Bapak udah mau *ngomong* lagi? Oh ya, silakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M):

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya hanya mengingatkan saja bahwa RSUD yang ada di Siberut itu membutuhkan izin IPAL ya. *Nah*, itu memang rumah sakit yang rujukan, sementara IPAL-nya *nggak* ada. Jadi tinggal butuh izin aja, Pak.

Demikian.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Pak Ketua.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Baik, nanti Dirjen PRL beserta PSDKP, Pak.

KETUA RAPAT:

Cukup?

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Pak Ketua.

F-PG (ALIEN MUS):

Satu, Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PG (ALIEN MUS):

Terima kasih, Ketua.

Pak Menteri, karena saya melihat 5 komoditi yang Bapak tekankan ini adalah udang, lobster, kepiting, nila dan rumput laut. Saya berharap di budidaya ini memang benar-benar target dan sasarannya kalau bisa memang, kalau udang, Bapak udah bikin *shrimp estate* ada ditempatnya Pak Darori. Setidaknya kepiting, nila, rumput laut ini di tempat-tempat yang betul-betul provinsi itu penghasil, jangan

sampai menaruh kegiatan tersebut di tempat yang tidak menghasilkan komoditi ini.

Khususnya di rumput laut, Bapak, kan pasti tahu rumput laut juga kan ada masalah *ice to ice virus* dan sebagainya, tolong juga pasti saya yakin dan percaya Pak Menteri tahu *positioning* yang bagus untuk rumput laut itu ada di mana. Jadi, kalau memang seperti itu, saya berharap ini 1,2 untuk di budidaya ini memang sangat kecil. Mohon Pak Menteri mencari lagi pinjaman dari luar negeri untuk membantu budidaya tersebut.

Pak Menteri, untuk Kalaju (Kampung Nelayan Maju). Di luar dari apa yang Pak Menteri sampaikan bahwa mungkin menghasilkan industri perikanan, saya harapkan juga Kampung tersebut benar-benar menjadi *targetting operational* untuk KKP. Baik dari BBM-nya, baik dari infrastrukturnya, baik dari jaminan nelayannya maksudnya asuransi nelayannya Pak, Pak Menteri, karena ini juga harus menjadi ya *legacy* lah buat Bapak, Pak, 5 tahun *eh* 4 tahun kalau *enggak* salah ya Bapak jadi Menteri ini. 4, 4, kan Pak? 4 iya, bukan 5, 4. Sesuai Komisi IV, Partai Golkar nomor 4.

KETUA RAPAT:

Dan Pak Edward pun nomor 4.

F-PG (ALIEN MUS):

Jadi Ketua, saya berharap kalau memang MLIN tadi sudah masuk di kesimpulan dan udah masuk penganggarannya, kami berharap kegiatan tersebut bisa di-*describe*-nya untuk kedua provinsi ini dan dibagi ya setidaknya adil dan merata lah Pak. Itu saja Ketua yang bisa saya sampaikan.

Kemudian untuk masalah DAK ini memang menjadi atensi. Kalau memang Pak Sekjen kalau di Kementerian lain mereka memberikan juga ke provinsi, tapi saya kemarin juga dikalahkan menyampaikan Pak Ketua. Misalkan provinsinya di mana, masuk di daerah wilayah yang ada di rekan-rekan semua yang ada di Komisi IV mungkin di-*direct* atau disampaikan agar kita mengetahui bantuan tersebut betul-betul menjadi atensi dan perjuangan yang ada di sini.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Pak Abdullah Tuasikal, 1 menit.

F-P.NASDEM (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.):

Siap Ketua. Bila perlu *enggak nyampe*.

Pak Menteri, tadi saya katakan bahwa ada Balai BP3 Ambon sekarang kan lagi mencoba untuk budidaya lobster dan kerja ini berhasil. Penetasan di Karamba pun jaring apung sudah bisa *sembilan puluhan persen*.

Saya cuma itu aja, saya minta untuk jadi perhatian aja. Kalau bisa anggaran tahun 2004 ini bisa masuk, saya kira *enggak* banyak Pak Menteri, dikit aja udah, udah bisa masyarakat Maluku bisa ikut menikmati ya kegiatan budidaya lobster ada di sana.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari dialog, diskusi, dan saran masukan Anggota Komisi IV. Sebelum kita akhiri rapat kerja hari ini, kami akan membacakan kesimpulan rapat.

1. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan RKA Tahun 2024 sebesar Rp7.046.659.869.000,00. Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S.626/MK.02/2023 Nomor B644/M.PPN/D.8/PP.0402 07 2023 tanggal 31 Juli 2023 hal: Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024 dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dengan komposisi per Eselon I sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp657.219.184.000,00;
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp86.285.440.000,00. Tolong masing-masing Eselon I disimak kalau ada kesalahan katanya atau angkanya.
 - c. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp940.673.896.000,00;
 - d. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp1.217.075.027.000,00;
 - e. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.135.513.469.000,00;
 - f. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp384.932.965.000,00;
 - g. Direktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut sebesar Rp654.360.873.000,00;
 - h. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar *satu triliun empat ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh*, 1.449.130.956.000,00; dan
 - i. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp521.468.059.000,00.

Selanjutnya Komisi IV akan menyampaikan hasil pembahasan RKA Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk disinkronisasi.

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Setuju.

KETUA RAPAT:

Jangan dijawab dulu kalau belum ditanya.

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

2. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung dan menyetujui rancangan usulan tambahan anggaran pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 sebesar Rp986.400.000.000,00 sehingga total usulan pagu alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebesar Rp8.033.059.869.000,00.

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Setuju.

KETUA RAPAT:

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

3. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendengarkan penjelasan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai pagu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang fisik, bidang fisik kelautan dan perikanan tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.309.900.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Provinsi sebesar Rp489.128.443.307,00; dan
 - b. Kabupaten kota terbesar Rp820.771.556.693,00.

Anggota?

ANGGOTA KOMISI IV:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Setuju.

KETUA RAPAT:

**(RAPAT: SETUJU)
(KETUK PALU 1 KALI)**

Sebelum kami menutup rapat kerja ini, kami persilakan Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan kata penutup.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (SAKTI WAHYU TRENGGONO):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang kami hormati Pimpinan dan Wakil Pimpinan, beserta seluruh Anggota Komisi IV DPR RI,

Terima kasih atas dukungan yang luar biasa selama ini dan ini adalah merupakan tahun yang tidak mudah saya kira. Tapi saya, kami, semua jajaran secara kompak akan berjuang terus seluruh dari keinginan seluruh Anggota tentu akan kita usahakan semaksimal yang kami bisa lakukan. Untuk itu dukungan dari seluruh Pimpinan, Wakil Pimpinan, dan Anggota sangat kami perlukan.

Demikian.

Terima kasih.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah rapat kerja pada hari ini.

Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV, mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ada kekurangan, kekhilafan.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbil'alamiin*, rapat kerja ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB)
(KETUK PALU 3 KALI)**

a. n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

ULFA NURFAJAR, S.E., M.A.B.
NIP. 197401251993022001